

Kelembagaan Madrasah di Indonesia

Isti'anah Abubakar*

Abstract

Madrasah as a form of innovation from boarding - indigenous institutional-sampoai currently undertaking in the embodiment of Islamic values in the process of education. This mandate is least visible from the travel of government policy with regard to religious education and madrasahs. Nevertheless, served until the current contribution of madrasahs is still not maximized, given the complexity of the problems faced. In this discussion, at least remind the need for integration of the spirit of madrasah education and pesantren if you want to survive.

Keyword: *institutional madrasah*

Pendahuluan

Eksistensi suatu negara ditentukan pada seberapa besar perhatian dan kepedulian negara terhadap pendidikan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Fazlur Rahman bahwa setiap reformasi dan pembaharuan dalam Islam harus dimulai dengan pendidikan (Fazlurrahman, 1979:260). Semua negara mempunyai corak pendidikan yang sesuai dengan ideologinya, dan juga tidak terlepas dari masalah yang ada. Artinya, pendidikan manapun pastilah mempunyai problem. Khusyrid Ahmad dalam Ismail menyatakan bahwa *of all the problem that confront the muslim world today the educational problem is the most challenging. The future of the muslim world will depend upon the way it responds to this challenge*. Statement tersebut setidaknya mengindikasikan beberapa hal, *pertama*, bahwa pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa, dimana semakin berkualitas pendidikan semakin berkualitas pula suatu bangsa, *kedua*, perbincangan permasalahan pendidikan merupakan perbincangan yang bersifat "*abadan*", artinya permasalahan selamanya akan menjadi bahan perbincangan mengingat pendidikan merupakan kegiatan interaksi yang sangat dinamis.

Pelaksanaan pendidikan Indonesia secara umum terbagi dalam beberapa tahapan. Dimiyati mengungkapkan ada 7 kegiatan pendidikan di Indonesia dari dulu sampai sekarang, yaitu : (1) kegiatan pendidikan Indonesia yang identik dengan masyarakat nusantara yang berada dalam taraf kebudayaan mistis, (2)

* Dosen PAI Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No 50 Malang 65144

kegiatan pendidikan Indonesia era kedatangan bangsa Cina, Arab, India yang mempunyai 2 sisi yaitu kegiatan pendidikan untuk penyebaran agama dan kegiatan pendidikan dilakukan penduduk nusantara yang berdasarkan pada local knowledge, local philosophy, local language, local technology, local system, (3) kegiatan pendidikan Indonesia yang dilaksanakan pemerintahan Hindia Belanda dengan kebijaksanaan pendidikan yang dualistis, (4) kegiatan pendidikan yang diniatkan untuk meraih kemerdekaan, (5) kegiatan pendidikan sebagai negara merdeka yang membangun nilai dan jati diri bangsa serta mengintegrasikannya ke dalam filsafat Pancasila, (5) kegiatan pendidikan dengan pemberlakuan sistem pendidikan nasional namun terperangkap kembali pada pengaruh berbagai model dan teori pendidikan Barat sehingga mengakibatkan terjadinya multidimensional dan multi strata, (7) kegiatan pendidikan yang berada dalam krisis berbagai teori sehingga mendorong untuk “membuat” paradigma pemikiran baru (Dimiyati, 2002:101-102).

Sedangkan Tilaar menyederhanakan kegiatan pendidikan Indonesia menjadi 3 fase yaitu (1) pendidikan pra kemerdekaan, (2) pendidikan orde baru, (3) pendidikan era reformasi (Abudin, 2007:1). Berdasarkan tahapan pelaksanaan pendidikan Indonesia tersebut diatas, maka, madrasah- pada mulanya merupakan lembaga pendidikan tradisional yang dikenal dengan nama madrasah *diniyyah*- merupakan lembaga pendidikan yang eksistensinya selalu mewarnai setiap masa. Dengan kata lain madrasah merupakan lembaga pendidikan yang sudah lama beroperasi yang tentu saja juga tidak terlepas dari kompleksitas permasalahan yang mengiringi eksistensinya. Pembahasan ini setidaknya akan merunut kelembagaan madrasah sehingga diperoleh pemahaman sistematis akan eksistensi madrasah.

Pembahasan

Madrasah dalam Perspektif Historis

Pada dasarnya ada dua faktor yang melatarbelakangi lahirnya Madrasah di Indonesia yakni *pertama*, Pendidikan tradisional (surau, masjid, Pesatren) dianggap kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. *Kedua*, adanya perkembangan sekolah-sekolah Belanda di kalangan

masyarakat cenderung meluas dan membawa watak sekularisme, sehingga harus diimbangi dengan adanya sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan terencana (Mastuki, 2001). Sedangkan dalam Samsul Nizar dinyatakan bahwa sebab berdirinya madrasah adalah, *Pertama*, munculnya gerakan pembaharuan yang dilatarbelakngi kesadaran dan semangat yang kompleks. Adapun faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaharuan adalah (a) keinginan untuk kembali kepada Al Qur an dan Hadits, (b) semangat nasionalisme dalam melawan penjajah, (c) memperkuat basis gerakan sosial, budaya dan politik, (d) pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, *Kedua*, sebagai respon pendidikan Islam terhadap Kebijakan Pendidikan Hindia Belanda (Samsul:291). Dengan kata lain, kemunculan madrasah bisa jadi menjadi penyempurna lembaga pendidikan Islam sebelumnya, yaitu pesantren. Adapun madrasah pada masa awal dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1 Pendirian Lembaga Pendidikan Islam Setelah Pesantren

No	Tahun	Nama Madrasah	Daerah	Pendiri
1	1905	Mambaul 'Ulum	Surakarta	Hadipati Sosrodiningrat
2	1907	Adabiyah	Sumatera Barat	Abdullah Ahmad
3	1910	Madrash School	Sumatera Barat	M. Thaib Umar
4	1912	Madrasah Masruroh	Sumatera Timur	-
5	1913	Madrasah Al Irsyad	Jakarta	-
6	1915	Diniyah	Padang Panjang	Zainudin Labai El Yunusy
7	1916	Mathlaur Anwar	Banten	KH. M. Yasin, dkk
8	1916	Madrasah Salafiyah	Tebu Ireng-JATIM	Hasyim Asyari
9	1917	Madrasah PUI	Majalengka	-
10	1918	Madrash Azizah	Sumatera Timur	
11	1918	Madrasah Muhammadiyah	Yogyakarta	Ahmad Dahlan
12	1918	Arabiyah School	Ladang Lawas	Sykeh Abbas
13	1918	Diniyah School	Sumatera Barat	Mahmud Yunus
14	1918	Al Najah Al Falah	Sei-Kalimantan	-
15	1920	Madrasah Al Quraniyah	Palembang	Abu Bakar Al Basri
16	1921	Sumatera Thawalib	Padang Panjang	HAMKA
17	1922	Al Sultaniah	Kal Bar	-
18	1923	Diniyah Putri	Padang Panjang	Rahmah El Yunusiyah

19	1925	Al Khairiyyah	Serang	-
20	1926	Gontor	Ponorogo	Zarkasyi
21	1927	Rejoso Peterongan	JATIM	-
22	1928	Normal Islam	Kalimantan	Abd. Rosyid
23	1928	Darul Funun	Palembang	Ibrahim
24	1930	Sajadah Abdiyah	Aceh	Teuku Beureuh
25	1931	Wajo Arbiah Islamiah	Wajo-Sulawesi	-
26	1933	Amiriyah Islamiah	Wetampone	-
27	1934	Madrasah Mustawiyah	Tapanuli	-
28	1936	Madrasah PERSIS	Bandung	M. Natsir
29	1936	Al Raudhatul	Pontianak	-
30	1938	Tarbiyah Islamiah	Mangkoso-Sulawesi	Abd Rahman Ambodale
31	1939	Nadtul Wathan	Lombok	Zainudin Pancor

(Diolah dari berbagai Sumber)

Berdasarkan tabel diatas, setidaknya dapatlah diketahui bahwa pertumbuhan madrasah yang berciri - memiliki daftar dan rencana pelajaran, mempunyai kelas atau berkelas, mempunyai administrasi sekolah yang agak lengkap diantaranya daftar siswa, melaksanakan sistem klasikal, guru benar-benar bertanggung jawab atas kemajuan murid-muridnya, untuk umur tertentu, murid-murid diharuskan membayarkan uang sekolah - sangat pesat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam sangat tinggi terbukti dengan banyaknya madrasah yang didirikan sebagai respon terhadap lembaga pendidikan kolonial. Namun demikian tidak semua madrasah di atas yang dapat ditelusuri secara detail historisitasnya, hanya sebagian madrasah saja yang dapat dijumpai keterangannya secara detail, seperti madrasah yang berada di Sumatera Barat yang telah ditulis secara detail oleh Mahmud Yunus.

Perjalanan Kebijakan Madrasah

Madrasah telah mengalami tiga fase perkembangan sejak Indonesia merdeka (Daulay 2004:47-48) . Fase *pertama*, madrasah periode pertama dibatasi dengan pengertian yang tertulis pada peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 dan peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1950, bahwa madrasah mengandung makna:

- a. Tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya.

- b. Pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan setingkat dengan madrasah.

Fase *kedua*, madrasah berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga menteri 1975. Pada fase ini telah terjadi konsentrasi keilmuannya dalam bidang agama, berubah menjadi konsentrasinya ada pengetahuan umum. Batasan madrasah SKB Tiga Menteri adalah “lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum”. Dalam surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975 dicantumkan tujuan peningkatan adalah: (1) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat; (2) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas; (3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Fase *ketiga*, yang mana madrasah setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Madrasah disebutkan sebagai sekolah yang berciri khas Islam. Pengertiannya bahwa seluruh programnya sama dengan sekolah yang ditambah dengan mata pelajaran agama Islam sebagai ciri keislamannya. Adapun kebijakan yang berkaitan dengan madrasah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Kebijakan Pemerintah

No	Uraian Kebijakan Pemerintah
1.	Pemerintah Belanda menerbitkan Ordonansi guru, kebijakan ini berlaku pada tahun 1905 dan kemudian diperbaharui pada tahun 1926. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki surat ijin mengajar dari pemerintah, tidak setiap orang meskipun ia adalah ahli agama yang dapat mengajar di lembaga pendidikan Islam.
2	<i>De Wilde Scholen</i>) sejak tahun 1932. Ordonansi ini bertujuan untuk mengawasi dan menertibkan sekolah swasta yang didirikan oleh orang Indonesia maupun orang Timur Tengah
3	<i>Shumubu</i> (Kantor Urusan Agama) merupakan cikal bakal lahirnya Kementrian Agama (setelah merdeka).
4	BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai badan legislatif waktu itu, dalam maklumatnya tertanggal 22 Desember 1945 (Berita RI Tahun II No. 4 dan 5 halaman 20 kolom 1), diantaranya menganjurkan "dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya diusahakan agar pengajaran di Langgar, Surau, Masjid dan

	Madrasah terus ditingkatkan
5	3 Januari 1946 pemerintah mendirikan Kementrian Agama yang dalam struktur organisasinya bagian C yang tugasnya mengurus masalah-masalah pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan agama di sekolah agama (Madrasah dan Pesntren).
6	KH. Wahid Hasyim saat beliau menjabat sebagai Menteri Agama tahun 1949 – 1952 memasukkan tujuh mata pelajaran umum dilingkungan Madrasah Tujuh mata pelajaran tersebut adalah membaca-menulis (latin), berhitung, bahasa Indonesia, sejarah, ilmu bumi dan olahraga.
7	Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1946 tentang pemberian bantuan bagi Madrasah yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952. Menurut ketentuan ini, yang dinamakan Madrasah adalah tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya. Jenjang pendidikan dalam Madrasah menurut ketentuan ini tersusun dari : MI lama pendidikannya 6 tahun, Madrasah lanjutan tingkat pertama (sekarang MTs) lama pendidikannya 3 tahun dan Madrasah Lanjutan Atas (sekarang MA) lama pendidikannya 6 tahun.
8	UU No. 4 tahun 1950 jo. No. 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. . Poin penting UU ini antara lain terdapat pada pasal 10 ayat 2 yang menyebutkan, " belajar di sekolah agama yang mendapat pengakuan Menteri agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar". Selanjutnya pada ayat (3) pada pasal yang sama menyebutkan, "kewajiban belajar itu diatur dalam undang-undang tersendiri.
9	KH. Moh. Ilyas, mengeluarkan kebijakan yang cukup drastis dengan pembaharuan sistem pendidikan di Madrasah yang kemudian dikenal dengan istilah Madrasah Wajib Belajar (MWB) 8 tahun
10	Madrasah inilah, pada tanggal 24 maret 1975 dikeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yang ditandatangani menteri agama, menteri pendidikan dan kebudayaan dan menteri dalam negeri.
11	akhir dekade 1980-an ketika pemerintah mengesahkan UU No. 2/1989 tentang sistem pendidikan nasional yang didalamnya mencakup semua jenis jalur pendidikan termasuk Madrasah
12	sejak awal 1990-an Depag sudah menempuh upaya mendongkrak mutu pendidikan Madrasah dengan membuat Madrasah Model dan Madrasah Keagamaan.
13	PP No. 29 tahun 1990 pasal 11 ayat (2) yang menegaskan, " sekolah menengah keagamaan dilimpahkan oleh menteri (P dan K) kepada Menteri agama". Tindak lanjut peraturan tersebut dituangkan dalam keputusan Menteri agama No. 371 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).

Berdasar tabel kebijakan madrasah di atas tentu saja memiliki implikasi terhadap operasionalisasinya. Setidaknya ada 2 permasalahan yang tergambar di

dalamnya, pertama, implementasi kebijakan yang belum maksimal, kedua amanah PP yang belum dilaksanakan, yaitu keberadaan Madrasah Keagamaan yang notabene Sekolah Menengah Keagamaan. Deskripsi kebijakan di atas juga mempunyai nilai strategis.

Nilai strategis itu tercermin pada beberapa aspek. *Pertama* dan merupakan aspek paling penting, pendidikan nasional menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu muatan wajib dalam semua jalur dan jenis pendidikan. *Kedua*, Dalam sistem pendidikan nasional Madrasah dengan sendirinya dimasukkan kedalam kategori pendidikan jalur sekolah. Jika sebelum ini terdapat dualisme antara sekolah dan Madrasah, maka dengan kebijakan ini dapat dikatakan bahwa Madrasah pada hakekatnya adalah sekolah. *Ketiga*, meskipun Madrasah diberi status pendidikan jalur sekolah, tetapi sesuai dengan jenis keagamaan dalam sistem pendidikan nasional.

Madrasah : Peluang dan Tantangan

Perbincangan mengenai peluang dan tantangan dapat diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pendidikan di Indonesia secara umum. Adapun permasalahan pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2 Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Ali Imron	Mastuhu	Tilaar	Muhaimin
1. Ketidakseimbangan jumlah penduduk dan fasilitas, horisontal maupun vertikal	1. Dualisme	1. Turunnya akhlak dan moral	1. Mutu
2. Pemerataan pendidikan	2. Dominasi pelatihan daripada pendidikan	2. Pemerataan kesempatan dan kualitas	2. Pendidik
4. Relevansi	3. Profesi guru	3. Rendahnya mutu di berbagai jenjang dan jenis pend	3. Kurikulum
5. Efektivitas	4. Materi lebih penting drpd metode	4. Rendahnya efisiensi internal	4. Manajemen
	5. Fokus pada memiliki drpd menjadi	5. Rendahnya efisiensi eksternal	5. Sarana dan prasarana
	6. Menghasilkan Manajer drpd pemimpin	6. Kelembagaan dan pelatihan yang belum jelas arahnya	6. status
	7. Mementingkan produk drpd hasil	7. Manajemen pendidikan belum sejalan degn manajemen	
	8. Mencari pembenaran drpd kebenaran		
	9. Mengutamakan model pemikiran linier drpd lateral		
	10. Mengutamakan reaktif drpd proaktif		
	11. What to think bkn how to think		

		8. pembangunan SDM belum profesional	
--	--	--------------------------------------	--

Berdasarkan list di atas, maka kita mengetahui bahwa para ahli pendidikan di atas setidaknya mempunyai pandangan yang berbeda dalam mengemukakan permasalahan pendidikan. *Ali Imron* lebih menekankan pada implementasi kebijakan pendidikan, *Mastuhu* lebih menyoroti pada operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan yang menyangkut metodologi, sedangkan *Tilaar* lebih menekankan pada kesesuaian antara kebijakan dan kondisi riil. Permasalahan yang dikemukakan *Muhaimin* masih sekitar komponen pendidikan dengan menambahkan urgensi status sebuah lembaga pendidikan. *Zainal Muttaqin* setidaknya telah mencoba mengklasifikasi persoalan mendasar pendidikan, yaitu (Zaenal, 2009):

1. Persoalan landasan atau fundasional (*foundational problems of education*)
2. Persoalan struktural lembaga pendidikan (*structural problems of educational institutions*)
3. Persoalan operasional pendidikan (*operational problems of education*)

Kita pun dapat menemukan induk persoalan pendidikan Indonesia berdasarkan list permasalahan di atas juga 3 persoalan mendasar pendidikan menurut *Zainal Muttaqin* sebagai berikut:

1. Kebijakan pendidikan dan implementasinya
2. Kualitas pendidikan dalam berbagai aspeknya

Berkenaan dengan kualitas, *Yahya Umar* mengemukakan bahwa: “harus diakui sampai kini banyak madrasah yang mutu pendidikannya dibawah standar, apalagi dari 40 ribu madrasah di Indonesia 92 persennya dikelola swasta dan sama sekali belum mendapat perhatian dari pemerintah”. Statement tersebut menyebutkan 2 data yaitu kuantitas sekaligus kualitas pendidikan Islam secara general meningkat namun juga berkualitas lemah.

Fenomena yang muncul saat ini adalah adanya dominasi perilaku yang mengarah pada kehancuran bangsa, yaitu (Depag, 2007):

- a. Meningkatnya kekerasan
- b. Ketidakjujuran yang membudaya
- c. Semakin tidak hormat pada guru dan orang tua

- d. Pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan
- e. Meningkatnya kecurigaan dan kebencian
- f. Penggunaan bahasa yang buruk
- g. Penurunan etos kerja
- h. Menurunnya tanggung jawab individu dan warga negara
- i. Meningginya perilaku merusak dan

Untuk mengatasi permasalahan kualitas di atas - menurut Soetomo adalah menjadikan azas pendidikan pesantren digunakan sebagai dasar pembangunan pendidikan nasional Indonesia . Pendidikan kita sampai saat ini masih saja menghasilkan output yang pribadi yang pincang (Malik, 2004). Kondisi ini sebenarnya merupakan peluang bagi lembaga pendidikan Islam, termasuk di dalamnya madrasah, mengingat mayoritas masyarakat kita mendambakan generasi penerus yang selamat dunia akherat.

Perencanaan Pengembangan Madrasah Berorientasi Masa Depan

Lembaga pendidikan Islam dalam hal ini madrasah sengaja didirikan dengan niatan untuk mampu menghadirkan dan mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pendidikannya. Maraknya perilaku yang mengarah pada kehancuran bangsa, menjadikan madrasah menjadi salah satu pilihan yang dipercaya masyarakat dalam pendidikan generasi masa depan, euforia inilah yang harus mampu dimanfaatkan oleh madrasah.

Dari sekian banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Madrasah Muhaimin (2006:74-75) mengatakan bahwa dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni tantangan internal dan tantangan eksternal. Untuk menghadapi dua tantangan tersebut, maka perubahan dan inovasi merupakan “kata kunci” yang perlu dijadikan titik tolak dalam mengembangkan pendidikan nasional pada umumnya. Pengembangan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat atau daerah, tetapi memerlukan masukan-masukan dan gerakan bersama antar semua institusi, baik institusi pendidikan (dasar, menengah dan tinggi), institusi ekonomi, politik, sosial, budaya, agama serta masyarakat pada umumnya, untuk mendukung terwujudnya cita-cita tersebut.

Perubahan atau inovasi itu memang hanyalah sebagai alat bukan tujuan. Apa yang dituju oleh perubahan itu adalah peningkatan mutu pendidikan, sehingga institusi pendidikan dituntut untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan secara serius dan tidak hanya sekadarnya, ia harus mampu memberikan *quality assurance* (jaminan mutu), mampu memberikan layanan yang prima, serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat sebagai *stakeholders*.

Pada dasarnya inovasi adalah ide, produk, kejadian atau metode yang dianggap baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau unit adopsi yang lain. Zahara Idris (1982) menyatakan faktor penyebab adanya inovasi pendidikan diantaranya:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan Indonesia.
2. Laju eksplosif penduduk yang cukup pesat, sehingga daya tampung dan fasilitas pendidikan sangat tidak seimbang.
3. Melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
4. Mutu pendidikan yang menurun.
5. Kurang ada relevansi antara program pendidikan dan kebutuhan.
6. Belum berkembangnya alat organisasi yang efektif serta belum tumbuhnya suasana dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan.

Dengan kondisi di atas, maka memang perlu ada upaya *continuous improvement* baik dari segi proses maupun institusional. Adapun upaya pemberdayaan madrasah menurut Haidar adalah (Daulay, 2007:62):

- a. Pemberdayaan manajemen , meliputi pemberdayaan SDM, manusia, pengelola pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, pengawas dan lain sebagainya dan siap memasuki era manajemen berbasis sekolah
- b. Pemberdayaan sistemnya dan sistem *top down* ke *bottom up* , sentralisasi ke desentralisasi
- c. Pemberdayaan kebijakan dan kebijakan yang memarginalkan madrasah kepada kebijakan yang membawa madrasah ke center

- d. Pemberdayaan masyarakat , melibatkan unsur-unsur masyarakat yang ikut serta di dalam pemberdayaan madrasah dengan cara meningkatkan peran serta stake holder dan akuntabilitas

Adapun menurut hemat penulis, untuk mengembangkan madrasah yang berorientasi masa depan haruslah mensinergikan pendidikan pesantren dan madrasah. Adapun bentuk yang telah banyak diadopsi adalah pemberlakuan sistem *full day scholl* dan sistem *boarding school*. Kedua bentuk itu pada dasarnya bertujuan meminimalisir intensitas peserta didik dengan realita yang ada.

Penutup

Lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga yang muncul dari keinginan masyarakat untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pendidikannya. Secara historis, lembaga pendidikan Islam Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan model pesantren yang notabene merupakan lembaga *indigeneous* kita yang juga telah berhasil mencetak lulusan yang bermental ulama dan ilmuwan. Ruh inilah yang harus dipegang kuat oleh lembaga pendidikan dalam bentuk apapun yang berniat untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam.

Daftar Rujukan

- Dimiyati, 2002, *Keilmuan Pendidikan Sekolah Dasar*, IKIP Malang
- Daulay, Haidar, *Sejarah Pertumbuhan Madrasah*,
- Fazlurrahman, 1979, *Islam*, Chicago, The University of Chicago Press
- Fadjar, Malik, 2004, *Sintesa Perguruan Tinggi dengan Pesantren (Upaya Menghadirkan Wacana Pendidikan Alternatif)*, UIN Malang
- Mastuki, 2001, *Seri Informasi Pendidikan Pendidikan Islam Indonesia* No. 6, Jakarta
- Muhaimin, 2006, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*
- Nata, Abuddin, 2007, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Kencana
- Nizar, Syamsul, *Sejarah Pendidikan Islam*,

